

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan Lembaga Keuangan Desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (*grass root*), yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan (*empowering*) adalah memampukan dan memandirikan masyarakat miskin. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya.

Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban, adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan

kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. Masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya.

Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar kebijakan penanggulangan kemiskinan terpenting. Kebijakan pemberdayaan masyarakat dianggap resep mujarab karena hasilnya dapat berlangsung lama. Isu-isu kemiskinan pun senantiasa cocok diselesaikan akar masalahnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Kemiskinan merupakan salah satu problem yang amat serius. Masalah ini juga masalah yang tidak ada habisnya dibahas dan masalah yang telah lama ada. Pada masa lalu, umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kekurangan pangan, tetapi kemiskinan dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern saat ini mereka tidak memiliki fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain karena sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah, dan bencana alam. Sedangkan kemiskinan buatan terjadi karena lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat membuat sebagian dari anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap hidup dalam kemiskinan. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di pedesaan. Upaya untuk

menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan.

Oleh karena itu, Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. Program-program pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan di berbagai negara. Di Indonesia sendiri sudah banyak program-program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan, seperti pengembangan desa tertinggal, perbaikan kampung, gerakan terpadu pengentasan kemiskinan, dan lain sebagainya. Hingga saat ini bangsa Indonesia juga belum benar-benar terlepas dari kemiskinan sejak krisis berkepanjangan. Disamping itu, terlepas dari kemiskinan merupakan bagaikan mimpi surga, karena kemiskinan tidak dapat dihilangkan, namun hanya dapat dikurangi.

Kondisi kemiskinan masyarakat ini biasanya ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan penduduk untuk mendapatkan akses dan peluang yang sama dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Kondisi tersebut mengakibatkan semakin tingginya beban sosial ekonomi masyarakat, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kemungkinan menurunnya mutu generasi yang akan datang.

Pembangunan pedesaan ke depan diperkirakan masih akan menghadapi beberapa kendala dan permasalahan mendasar seperti terbatasnya sarana dan prasarana dasar, informasi peluang usaha/pasar, serta pengetahuan, keterampilan teknis dan kewirausahaan masyarakat yang menghambat berkembangnya kegiatan ekonomi rakyat di perdesaan, masih terbatasnya kemampuan masyarakat dan atau

lembaga kemasyarakatan di perdesaan dan belum mantapnya kelembagaan sosial ekonomi masyarakat.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kebijakan pembangunan pedesaan antara lain akan diarahkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan desa, guna mewujudkan desa-desa yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi yang memadai.¹

Dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan tersebut perlu dilakukan upaya-upaya antara lain pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin dan rentan di desa, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pedesaan, peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, perwujudan tata kelola pemerintahan desa yang baik, dan pengembangan ekonomi pedesaan.

Di Kota Tarakan jumlah penduduk miskin tahun 2017 mencapai 15.840 orang atau sebesar 6,32 Persen dari total penduduk. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2016 sebanyak 12.520 orang atau sebesar 5,17 Persen dari total penduduk, maka terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 3.320. Bila dilihat menurut Kabupaten/Kota, pada tahun 2017 Kota Tarakan berada di peringkat 4 dari 5 Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara.²

Laju perkembangan ekonomi perkotaan yang semakin pesat membuat intensitas kegiatan perkotaan meningkatkan dan pemanfaatan lahan yang semakin kompetitif, sedangkan di sisi lain,urbanisasi menyebabkan tingginya permintaan

¹Undang-Undang Nomor 6 Pasal 78 Tahun 2014 tentang Desa

² Badan Pusat Statistik Kota Tarakan Tahun 2017

lahan tempat tinggal di dalam kota. Pemerintah cenderung terfokus pada pengembangan ekonomi dan cenderung melupakan aspek pertumbuhan kawasan di wilayah pinggiran. Kondisi tersebut terjadi pula pada kawasan permukiman tepi pantai di Kota Tarakan dengan ciri-ciri fisik yang mirip dengan karakteristik kampung kota atau permukiman kumuh kota.

Perkembangan kota yang semakin pesat menuntut menghasilkan kemajuan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Pesisir Kecamatan Tarakan Timur dipersiapkan sebagai kawasan *Central Business District (CBD)*, dengan dinamika ekonomi yang tinggi dan bertujuan menunjang perekonomian daerah. Hal ini berarti bahwa keberadaan kawasan permukiman kumuh, tidak sesuai dengan tujuan pembangunan Kota Tarakan yang berorientasi pada konsep *Waterfront City*³.

Adanya sarana prasarana penunjang yang baik di permukiman akan meningkatkan kualitas lingkungan hunian. Sebaliknya kondisi sarana prasarana yang buruk dapat menjadi masalah yang serius bagi lingkungan hunian, dan dapat mengakibatkan kekumuhan di lingkungan tersebut.

Secara umum, wilayah pesisir telah terlayani oleh sarana-prasarana vital permukiman seperti air bersih, sanitasi, persampahan, jaringan jalan, listrik dan drainase. Namun permasalahannya adalah tingkat kualitas pelayanan yang tidak begitu baik, adapun beberapa permasalahan sarana-prasarana permukiman pesisir di Kecamatan Tarakan Timur adalah permukiman di atas air sebagian warga masih belum memiliki sanitasi yang memadai, warga telah memiliki WC pribadi, namun

³RTRW Kota Tarakan tahun 2010-2031

pengelolaan *septic-tank* masih belum baik, warga membuang limbah *septic-tank* di perairan, sehingga mencemari laut. Masalah selanjutnya adalah air bersih, ekonomi masyarakat yang sebagian berpenghasilan rendah dari hasil melaut dan ketidakpastian status hukum kepemilikan lahan menyebabkan sebagian masyarakat tidak dapat menikmati layanan PDAM. Sebagai solusinya, masyarakat setempat membeli air dari pedagang keliling ataupun menyimpan air hujan di tandon. Selanjutnya, yang terakhir adalah persampahan, pada umumnya masyarakat telah terlayani oleh pasukan kebersihan. Namun terdapat warga yang masih mengolah sendiri sampahnya dengan cara dibakar, maupun langsung membuangnya kelaut. Hal ini dikarenakan alasan ekonomi, guna mengurangi pengeluaran untuk membayar petugas kebersihan.

Masalah lain yaitu kurang diperhatikannya pembangunan Drainase di Kelurahan Mamburungan. Minimnya anggaran Pemerintah Kota Tarakan menjadi alasan terhentinya bantuan perbaikan infrastruktur untuk RT. Bahkan, dalam setiap pembahasan Musrenbang yang dilakukan setiap tahun sudah tidak lagi membahas masalah fisik sarana dan prasarana, tapi hanya fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan sosial budaya. Hal ini tentu menjadi kendala bagi setiap ketua RT, mengingat bantuan perbaikan infrastruktur sangat dibutuhkan. Salah satunya dikawasan RT 08, Kelurahan Mamburungan, Tarakan Timur.

Secara umum kawasan Mamburungan masih dirasa tertinggal dalam segi pembangunan dan masih banyak yang harus dibenahi, Salah satunya saluran drainase yang dangkal. Hal ini menyebabkan munculnya genangan air dan bahkan yang lebih buruk adalah banjir apabila musim hujan. Sebelumnya, terdapat saluran pipa pembuangan air selebar 9 inc di wilayah tersebut, namun seiring berjalannya waktu

pipa tersebut telah tertimbun dan banjir kembali terjadi. Selain mengajukan proposal bantuan kepada pemerintah, masyarakat sekitar juga telah berupaya untuk meminimalisir sedimentasi parit dengan cara kerja bakti setiap bulan⁴.

Sedangkan, permasalahan dari sudut pandang Ilmu Pemerintahan adalah kurangnya respon pemerintah kota dalam merencanakan dan membangun prasarana pada daerah perkembangan pemukiman baru. Hal ini membuat masyarakat secara swadaya membuka bidang tanah dan membangun pemukiman baru. Padahal hal ini tidak di dasari oleh pengetahuan tentang *site plan* yang benar. Tentunya hal ini menyebabkan terjadinya tata letak kavling dan fasilitas pemukiman yang tidak teratur. Masyarakat pada umumnya tidak mengerti ambang batas dan daya tampung sebuah lingkungan, sehingga lingkungan tersebut terus-menerus disesaki pemukiman dan menjadikan tempat tinggal yang saling berhimpitan. Selain itu, terbatasnya anggaran dan prioritas program menjadi permasalahan bagi pembangunan sarana dan prasarana.

Perencanaan tata ruang kota selama ini masih saja cenderung terlalu berorientasi pada pencapaian tujuan ideal berjangka panjang, yang sering kali meleset akibat banyaknya ketidak pastian. Disisi lain terdapat jenis-jenis perencanaan yang disusun dengan landasan masalah secara *ad hoc* yang berjangka pendek, kurang berwawasan luas, sering dilupakan bahwa *short term* again akan berakibat pada *long term pain*⁵. Pertumbuhan dan pembangunan kota seringkali juga tidak terkendali dan mengabaikan aspek lingkungan. Pertumbuhan Kota selain bertumpu pada

⁴Kaltara.prokal.co diakses tanggal 9 Desember 2018

⁵ Eko budiharjo. 2005. *Kota Berkelanjutan*. Bandung. PT. Alumni. Hal: 10

pertumbuhan ekonomi harusnya juga memperdulikan keseimbangan lingkungan, keserasian atau keseimbangan ekologi. Penting pula pembangunan kota menekankan pada kekerabatan komunitas. Agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Pertumbuhan Kota yang tidak terkendali biasanya berada di zona pusat-pusat industri dan perdagangan.

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam percepatan penanganan permukiman kumuh dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses Universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Sebagaimana arah kebijakan pembangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk membangun sistem, fasilitasi pemerintah daerah dan fasilitasi komunitas maka KOTAKU akan menangani pemukiman kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan peran masyarakat.⁶

Sebagai implementasi percepatan penanganan kumuh, KOTAKU akan melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa/kelurahan, kawasan dan kabupaten/kota. Kegiatan penanganan pemukiman kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh.

Tahapan pelaksanaan Kotaku meliputi tahapan pendataan, dimana lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang bernama Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM), sudah melakukan pendataan kondisi awal 7 indikator

⁶www.kabartarakan.com diakses tanggal 9 Desember 2018

kumuh di desa/kelurahan masing-masing. Setelah itu, disusun dokumen perencanaan kabupaten/kota. Hasil perencanaan ini menentukan kegiatan prioritas untuk mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru, yang akan dilaksanakan, baik oleh masyarakat atau oleh pihak lain yang memiliki keahlian dalam pembangunan infrastruktur pada entitas kawasan dan kota.⁷

Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala guna memastikan ketetapan kualitas dan sarana kegiatan, sehingga dapat membantu percepatan penanganan permukiman kumuh. Kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan masyarakat akan dilakukan bersama tahapan kegiatan. Termasuk mendorong perubahan perilaku dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar permukiman.

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan guna mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua maksud, pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat dan partisipasi Pemerintah Daerah.

Untuk mempermudah pelaksanaan program KOTAKU maka pemerintah membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 yang memiliki tugas pemercepat

⁷Pedoman umum *KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)*, Direktorat Jendral Cipta Karya, 2015 hlm. 27-30

Perubaham (*enabler*), perantara (*mediator*), pendidik (*educator*), perencana (*planner*), advokasi (*advocation*), aktivis (*activist*), pelaksana teknis (*technical roles*).

Dengan adanya Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) diharapkan dapat membantu Pemerintah Desa atau Lurah dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif diantaranya adalah mengerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya, membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya, membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif, mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat, dan melakukan pekerjaan purna waktu untuk menghadiri pertemuan/musyawarah, membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan.⁸ Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri. Maka, swakelola masyarakat adalah sebuah proses pekerjaan yang di rencanakan oleh masyarakat, dikerjakan oleh masyarakat, dan diawasi sendiri oleh masyarakat. Hal ini sangat berkaitan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yaitu, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*) dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu

⁸Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007

berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan.⁹ Pengertian pemberdayaan (*empowerment*) tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi dan kemampuan yang dimilikinya.

Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dan meningkatkan kualitas individu, kelompok atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing serta mampu hidup mandiri. Pemberdayaan juga memiliki makna menghidupkan kembali tatanan nilai, budaya, dan kearifan lokal dalam membangun jati dirinya sebagai individu masyarakat. Misalnya, menghidupkan kembali sifat gotong royong dan tolong menolong dalam masyarakat Indonesia terutama di daerah perkotaan merupakan salah satu wujud/bentuk pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat inilah yang di jadikan acuan dalam meminimalisir Kota Kumuh. Oleh karena itu, peneliti ingin menelaah lebih jauh mengenai Swakelola Masyarakat Studi Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan tentang program KOTAKU dengan menggunakan Pola 3-7-10.

Seperti yang di ketahui, Pola 3-7-10 adalah tahapan yang ditempuh sebagai acuan dalam upaya menguatkan sistem manajemen pembangunan desa secara terpadu untuk meningkatkan kemampuan pelaku pembangunan, mewujudkan

⁹ Djohani, R. (2003). *Partisipasi, Pemberdayaan, dan Demokrasi Komunitas*. Bandung: Studio Driya Media

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Pola 3-7-10 terdiri dari 3 hakekat, 7 prinsip, dan 10 langkah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Evaluasi Program “Kotaku” melalui pola swakelola masyarakat di Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam evaluasi Program “Kotaku” melalui pola swakelola masyarakat di Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan?

1.3 Tujuan

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program “Kotaku” melalui pola swakelola masyarakat di Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Pelaksanaan Program “Kotaku” melalui pola swakelola masyarakat di Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan.

1.4 Manfaat

Setelah mengetahui rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, juga diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan ataupun bahan referensi dalam konsep perumusan pelaksanaan Program “Kotaku” melalui swakelola masyarakat di Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan tentang pembangunan Sarana dan Prasarana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini sebagai bahan kajian dan sumbangn pemikiran bagi upaya pengembangan ilmu politik dan pemerintahan, khususnya pada aspek Pelaksanaan Program “Kotaku” Melalui swakelola masyarakat di Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan.

1.5 Definisi Konsep

Definisi Konsep bersandar pada tema penelitian dan latar belakang masalah, maka dapat ditemukan konsep yang perlu di definisikan dengan tujuan agar peneliti dan pembaca memiliki kesamaan persepsi dan pemahaman. Dalam penelitian ada beberapa konsep yang perlu untuk di definisikan antara lain adalah :

- a. Evaluasi

Evaluasi diartikan sebagai penaksiran atau penilaian. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan

nilai dari suatu hal¹⁰. Evaluasi dapat digunakan untuk memeriksa tingkat keberhasilan program berkaitan dengan lingkungan program dengan suatu penilaian apakah program diteruskan, ditunda, ditingkatkan, dikembangkan, diterima, ditolak, berhasil atau tidak. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu.

b. Pelaksanaan Program

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Sedangkan Joan L. Herman yang dikutip oleh Farida mengemukakan definisi program sebagai, “segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh”.¹¹ Lebih lengkap lagi, Hasibuan juga mengungkapkan bahwa program adalah, suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijakan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.¹²

c. Program “Kotaku”

Program KOTAKU atau Kota Tanpa Kumuh adalah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan

¹⁰Nurkancana, Wayan 1983 *Evaluasi Pendidikan*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm 15-17

¹¹ Farida Yusuf Tayibnafis, 2008, *Evaluasi Program Dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan Dan Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 9

¹²Hasibuan, Malayu S.P. 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi, Jakarta : Bumi Aksara, hlm. 72

Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung gerakan 100-0-100. Yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas. Program kotakus akan menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat.

d. Pola 3-7-10

Pola 3-7-10 adalah tahapan yang ditempuh sebagai acuan dalam upaya menguatkan sistem manajemen pembangunan desa secara terpadu untuk meningkatkan kemampuan pelaku pembangunan, mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Pola 3-7-10 terdiri dari :

- 3 Hakekat
- 7 prinsip
- 10 Langkah

1.6 Definisi Operasional

Menurut Sofyan Effendi, definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain, definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana

caranya mengukur suatu variabel¹³. Penelitian ini nantinya akan menganalisis data dengan menggunakan indikato-indikator sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Swakelola masyarakat melalui pola 3-7-10 di Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan

1) Pendataan kondisi awal

2) Pelaksanaan rencana kerja yang meliputi 10 langkah pola swakelola masyarakat yaitu :

a) Persiapan

- Penyiapan diri pelaku (LPMK dan LK yang lain)
- Pendataan umum prioritas lokasi garapan

- Penyiapan masyarakat

b) Perencanaan

- Pendataan bersama masyarakat
- Perencanaan pembangunan bersama masyarakat

- Penyusunan rencana pembangunan tingkat Desa/Kelurahan (musyawarah pembangunan)

c) Pelaksanaan

- Pengorganisasian & penggerakan swadaya gotong royong
- Pelaksanaan dan pembinaan kegiatan

d) Penilaian & tindak lanjut

- Penilaian dan pelaporan keberhasilan pembangunan

¹³ Moleong, Lexy J. 2010. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rosda hlm. 20

- Tindak lanjut hasil pembangunan

3) Evaluasi

Evaluasi program merupakan suatu proses. Secara eksplisit evaluasi mengacu pada pencapaian tujuan sedangkan secara implisit evaluasi harus membandingkan apa yang telah dicapai dari program dengan apa yang seharusnya dicapai berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelaksanaan program, kriteria yang dimaksud adalah kriteria keberhasilan pelaksanaan dan hal yang dinilai adalah hasil atau prosesnya itu sendiri dalam rangka pengambilan keputusan.

Berikut adalah langkah-langkah Evaluasi Program:

- a) Menyusun suatu rencana evaluasi dalam bentuk kisi-kisi apa yang akan dinilai berkaitan dengan tujuan program.
- b) Menyusun instrumen evaluasi, misalnya, skala, daftar rentang, pedoman observasi/kuesioner, pedoman wawancara, pedoman dokumentasi.
- c) Melaksanakan pengamatan lapangan, yaitu mengumpulkan data dari responden atau sampel evaluasi.
- d) Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, selanjutnya dapat ditentukan tingkat keberhasilan program, kelemahan-kelemahan atau kendala-kendala untuk diperbaiki.
- e) Mengajukan sejumlah rekomendasi terhadap program yang telah di evaluasi tersebut.

- f) Menyusun laporan evaluasi dan menyebarluaskan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan.
- b. Faktor Penghambat pelaksanaan Swakelola masyarakat melalui pola 3-7-10 di Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan
 - 1) Kurang peka nya masyarakat terhadap kondisi pembangunan di sekitarnya.
 - 2) Kurangnya Kordinasi antara pemerintah desa dengan warga
 - 3) Terbatasnya anggaran

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dimana menurut Bogdan & Taylor dalam Imam Gunawan yaitu “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan para latar dan individu secara utuh”¹⁴.

Adapun langkah-langkah metode yan digunakan dalam mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Dimana pengertian penelitian deskriptif menurut Sugiyono adalah sebagai berikut: “penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui niali variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih

¹⁴Gunawan, Imam. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika

(independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain¹⁵.

2. Subyek Penelitian

- Kepala Dinas PUPR
- Kepala Badan Keswadayaan Masyarakat
- Kepala Camat Tarakan Timur
- Kepala Lurah Mamburungan
- Ketua RT
- Tokoh Masyarakat
- Warga Mamburungan

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang akurat haruslah didukung oleh sumber informasi dan data yang harus valid. Data tersebut harus digali dari sumber-sumber yang berhubungan dan ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti, sehingga data harus didapatkan dari sumber yang dapat dipercaya. Hal tersebut guna mendukung kaidah keilmiahan dan mendapatkan data yang didapatkandari sumber yang relevan. Menurut Sugiyono ada dua sumber data primer dan sekunder¹⁶. Maka dalam penelitian yang dilakukan ini terdapat dua sumber data, yaitu :

- Data Primer

¹⁵ Sugiyono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta. hlm. 5

¹⁶ Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta. Bandung. hlm. 225

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada peneliti, untuk diamati dan dicatat. Data primer yang dimaksud adalah kata-kata dan tindakan yang didapatkan dari hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak terkait yang akan menjadi informan. Adanya informasi yang diberikan oleh pihak yang terlibat, dapat menggali fenomena yang akan diteliti secara mendalam. Adapaun pihak-pihak yang dijadikan informan sebagai proses penggalian data informasi pada penelitian ini yang meliputi kepala atau perangkat pemerintah Desa.

- Data Sekunder

Definisi data sekunder menurut Sarwono adalah data yang tersedia sehingga kita tinggal mencari data dan mengumpulkan¹⁷. Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung. Data sekunder digunakan sebagai pendukung dalam menguatkan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi Salinan perda, profil instansi atau Lembaga terkait yang didapatkan melalui dokumentasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

- Observasi

¹⁷ Sarwono, Jonathan. 2007. *Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset

Observasi adalah perilaku yang tampak dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dapat berupa perilaku yang dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung dan dapat diukur. Tujuan tersebut adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, individu yang terlihat beserta aktivitas yang berlangsung dalam lingkaran yang diamati dan perilaku yang dimunculkan serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat¹⁸. Sedangkan merujuk kepada pengertian bahasa, pengertian observasi adalah memperhatikan dan mengamati. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa observasi adalah sebuah pengumpulan data dengan melaksanakan kegiatan pengamatan.

- Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara atau yang mengajukan pertanyaan, dan pihak yang lain adalah informan yaitu orang yang memberikan jawaban atas wawancara¹⁹. Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara baku terbuka, yaitu wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku dan para subyeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai sehingga mereka yang diwawancarai memahami dan mengetahui maksud tujuan

¹⁸ Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika

¹⁹ Moleong, *Ibid*, hlm. 186

wawancara itu. Dengan jenis wawancara tersebut informan menjawab dengan bebas dan permasalahan yang termuat dalam pertanyaan dapat terjawab dengan baik.

- Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau oleh orang lain tentang subjek yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku dalam bentuk tulisan, gambar atau data-data yang didapatkan dari dokumen atau catatan resmi instansi yang diteliti²⁰. Pada umumnya, dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa gambar-gambar, foto-foto, rekaman, wawancara dokumen-dokumen resmi, dan lain sebagainya yang berasal dari Lembaga atau instansi yang diteliti sesuai dengan kebutuhan penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti mendapatkan informasi dan juga data primer tentang penelitiannya. Pada penelitian ini lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat

²⁰ Herdiansyah, *Ibid*, hlm. 143

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data²¹, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Karena jenis penelitian ini deskriptif kualitatif maka akan digunakan analisis data yang dikemukakan oleh Miles & Huberman²². Bahwa analisis data kualitatif terdiri dari empat komponen, yaitu :

- Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi²³. Proses pengumpulan data dilakukan saat sebelum penelitian dan pada saat penelitian. Pada kegiatan ini tidak ada waktu secara spesifik untuk menentukan batas akhir dari pengumpulan data di lapangan, karena sepanjang penelitian masih berlangsung selama itulah pengumpulan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti akan dilakukan. Sebagaimana yang telah peneliti sampaikan di sub-bab sebelumnya bahwa pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi langsung, melakukan wawancara dengan informan, membuat dokumentasi dan membuat catatan di lapangan.

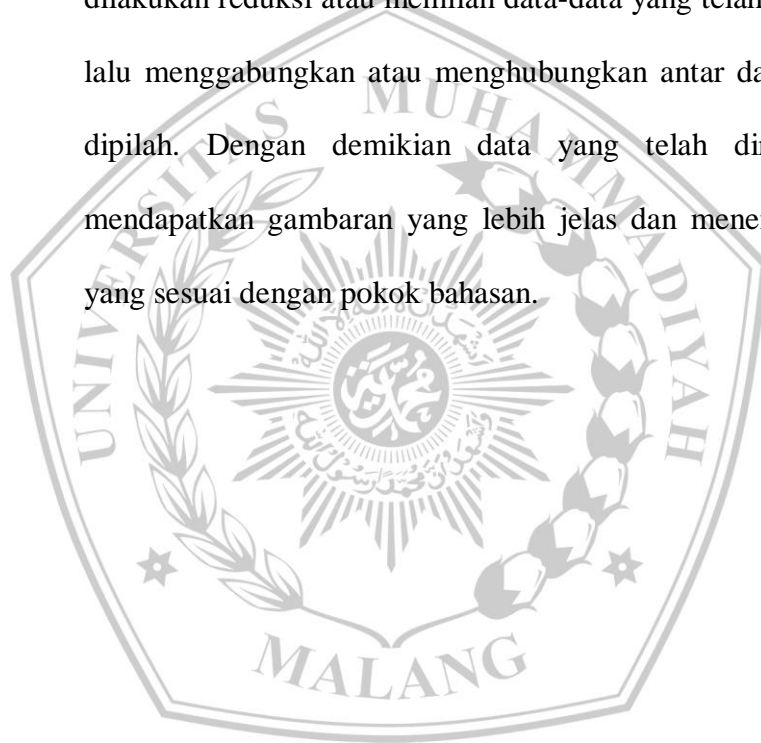
- Reduksi data

²¹ Moleong, *op.cit*, hlm. 103

²² Huberman, Miles. 2007. *Analisis Data Kualitatif*, (UI) Press : Jakarta

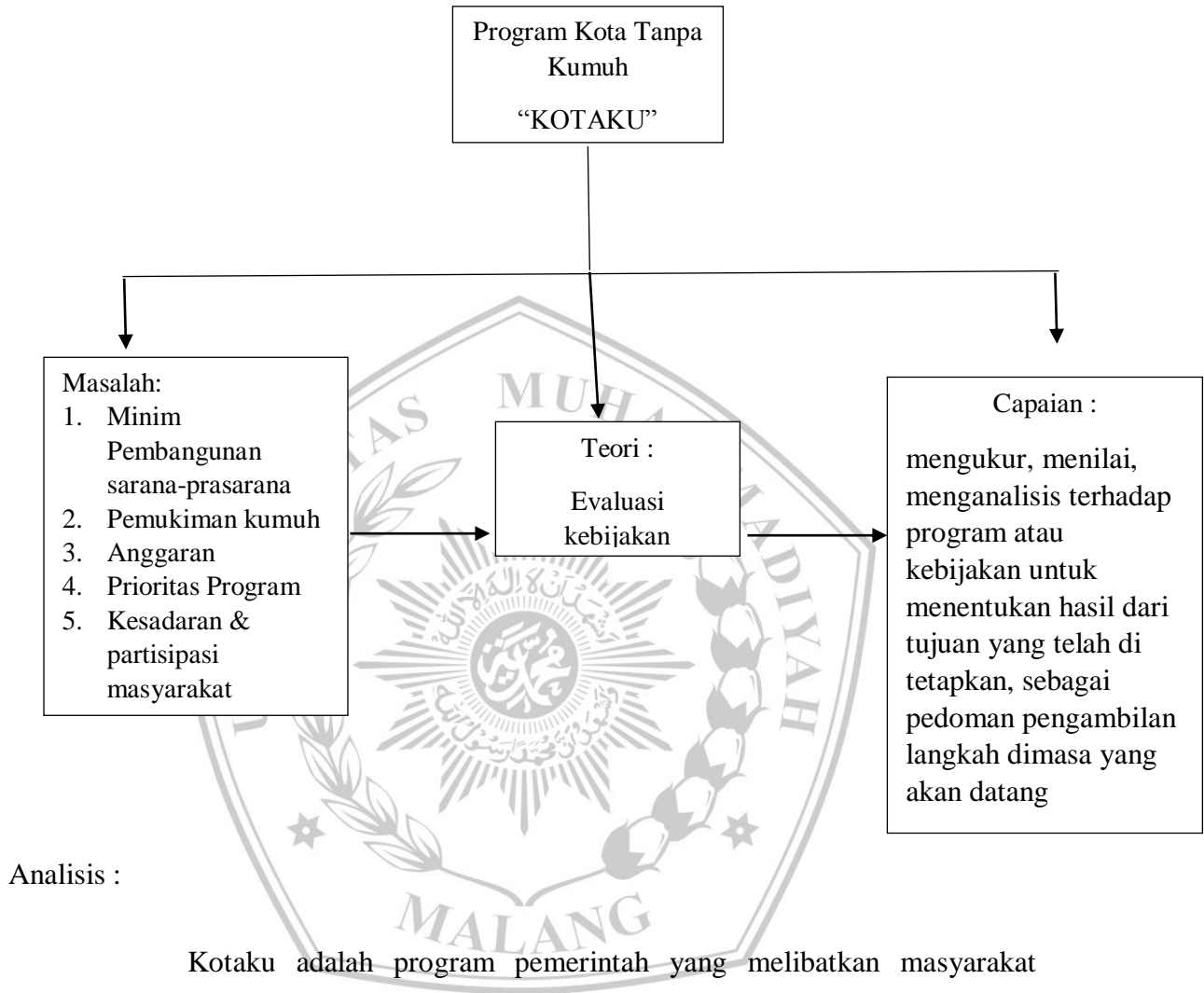
²³ Bungin, Burhan. 2013. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya²⁴. Pada proses ini, peneliti lakukan setelah mendapatkan data-data dari kegiatan wawancara, hasil observasi dan hasil studi dokumentasi yang kemudian dirubah menjadi bentuk tulisan dan dikategorikan sesuai fokus bahasan masing-masing. Setelah itu dilakukan reduksi atau memilah data-data yang telah dikumpulkan lalu menggabungkan atau menghubungkan antar data yang telah dipilah. Dengan demikian data yang telah direduksi akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menemui data-data yang sesuai dengan pokok bahasan.



²⁴Sugiyono, *Ibid*, hlm. 247

Alur Pemikiran



Kota tanpa pemukiman kumuh yang melahirkan RPJMN tentang pemukiman layak huni dan berkelanjutan.

Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur menjadi salah satu sasaran Pemerintah Kota Tarakan untuk di lakukan program “Kotaku” karena terdapat beberapa masalah yaitu minimnya pembangunan sarana dan prasarana penunjang misalnya jalan, jaringan listrik, drainase yang buruk serta sanitasi yang belum memadai sehingga memungkinkan masyarakat membuang limbahnya ke laut. Masalah selanjutnya adalah keterbatasan anggaran, minimnya anggaran Pemerintah Kota Tarakan menjadi alasan terhentinya bantuan perbaikan insfrastruktur untuk RT. Bahkan, dalam setiap pembahasan Musrenbang yang dilakukan setiap tahun sudah tidak lagi membahas masalah sarana dan prasarana, tapi hanya fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Selain itu prioritas program juga menjadi masalah dalam proses pembangunan.

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan dimana evaluasi merupakan proses kegiatan pengukuran, menilai, menganalisis terhadap program atau kebijakan untuk menentukan hasil dari tujuan yang telah di tetapkan, sebagai pedoman pengambilan langkah dimasa yang akan datang.

Secara umum evaluasi dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.²⁵

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk menentukan sejauhmana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan program dapat tercapai serta untuk melihat sejauh mana kesenjangan antara ekspektasi dengan kenyataan.



²⁵Budi Winarno, 2008. *Kebijakan Publik*, PT. Buku Kita: Jakarta